PENDIDIKAN ISLAM, DEMOKRATISASI DAN KEWARGANEGARAAN

Muhammad Fahmi
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
E-mail: fahme_yes@yahoo.com

Abstract: *Islamic education is potential in the formation of civil society and community-citizenship. Islamic education can be a critical educational vehicle for the people and relieve the lowest layers of society of ignorance, backwardness, helplessness and poverty. Islamic education can become an important educational institution in foster of democratic values continuously through the process of democratization in education or democratic education. In some countries, like Indonesia, Egypt, Iran, China, Brazil, and United States make great efforts to democratize education to strive continuously for implementation of democratic education. It is indeed a need for each country to reach a better situation for every citizen. The efforts of Synergize Islamic education, democratization and citizenship, should be done by making Islam as the source of values to build the character of the nation that creat Islamic education based on nationality.*

Keywords*: Islamic Education, democratization, citizenship.*

Pendahuluan

Paper ini membahas tentang peranan pendidikan (Islam) dalam memperkuat proses demokratisasi, serta secara lebih spesifik relasi antara pendidikan Islam dan pengembangan pendidikan kewarnegaraan. Ruang lingkup pembahasan juga menyasar pada praktek-praktek demokratisasi dalam dunia pendidikan dalam rangka menyiapkan manusia-manusia yang mampu menerapkan nilai-nilai demokratis dalam praktek kehidupan bernegara. Di samping itu, paper ini juga menghubungkan antara pendidikan Islam dengan pengembangan pendidikan kewarganegaraan.

Pembahasan berkutat pada praktek relasional antara pendidikan Islam, demokratisasi, dan kewarganegaraan yang

terjadi di Indonesia, dan sekilas tentang praktek yang terjadi di Mesir dan Iran. Selain itu, sekilas disinggung tentang berbagai konsep dan praktek pendidikan yang terjadi di Cina dan Brazil yang terkait pada persoalan diatas, sebagai bahan perbandingan. Pembahasan pada paper ini masih bersifat dangkal dan tidak begitu mendalam, karena keterbatasan referensi.

Perspektif Teoretik Pendidikan Islam, Demokratisasi dan Kewarganegaraan

Pendidikan Islam memiliki potensi besar dalam pemberdayaan pendidikan rakyat secara keseluruhan dengan kedekatannya kepada masyarakat muslim. Pendidikan Islam memiliki potensi dalam pembentukan *civil society*, masyarakat madani, atau masyarakat-kewarganegaraan pada tingkat akar rumput kaum muslimin. Dalam konteks ini, pendidikan Islam dapat menjadi sebuah wahana pendidikan kritis bagi rakyat; membebaskan lapisan terbawah masyarakat dari kebodohan, keterbelakangan, ketidakberdayaan dan kemiskinan.[1] Di sini, pendidikan Islam dapat menjadi lembaga pendidikan penting dalam penanaman dan penumbuhan nilai-nilai demokrasi.

Penanaman dan penumbuhan nilai-nilai demokrasi dapat dimulai dari lembaga pendidikan Islam melalui proses demokratisasi pendidikan atau pendidikan yang demokratis. Demokratisasi pendidikan yang menjadi salah satu gagasan kunci dalam wacana pendidikan kritis merupakan salah satu prasyarat penting bagi pertumbuhan sistem politik demokrasi. Gagasan pendidikan kritis mengandung makna dan tujuan transformasi terhadap realitas, termasuk realitas politik. Perubahan atau transformasi realitas politik itu semakin signifikan dan kontekstual bagi negara-negara berkembang yang tengah berada dalam proses transisi menuju demokrasi dan pada gilirannya bertujuan membentuk *civil society* seperti Indonesia.

Demokratisasi pendidikan mengandung arti, proses menuju demokrasi di dalam pendidikan. Ketika ada kata Islam di belakang kata pendidikan, berarti proses menuju demokrasi di dalam pendidikan Islam. Demokratisasi pendidikan merupakan

[1] Jalaluddin Rahmat, *Islam Alternatif* (Bandung: Mizan, 1998), Cet. IX.

suatu keharusan. Pasalnya, melalui proses inilah diharapkan dapat muncul manusia-manusia yang berwatak demokratis. Tujuan demokratisasi pendidikan adalah menghasilkan lulusan yang merdeka, berpikir kritis, berakhlak mulia, dan toleran dengan pandangan dan praktek demokratis. Dengan demikian, demokratisasi pendidikan Islam berguna untuk menyiapkan peserta agar terbiasa bebas berbicara dan mengeluarkan pendapat secara bertanggung jawab, terbiasa mendengar dan menghargai pendapat orang lain, terbiasa bergaul dengan rakyat, ikut merasa memiliki, sama-sama merasakan suka dan duka bersama masyarakat, dan mempelajari kehidupan masyarakat yang kesemuanya terbingkai dalam Islam.

Demokratisasi pendidikan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu demokrasi pendidikan (wacana pendidikan kritis yang dapat dijadikan *starting point* untuk membangun sistem pendidikan yang lebih adil dan berhasil untuk mendorong demokratisasi, sehingga akan terbentuk (*civil society*). Cara yang kedua adalah dengan pendidikan demokrasi, yang secara substantif menyangkut sosialisasi, diseminasi, aktualisasi, implementasi konsep, nilai, budaya dan praktek demokrasi melalui pendidikan.[2]

Keberadaan demokrasi dalam pendidikan Islam, tentu saja tidak dapat dilepaskan dari sejarah atau demokrasi dalam ajaran Islam dan demokrasi secara umum. Demokrasi dalam ajaran Islam secara prinsip telah diterapkan oleh Nabi Muhammad saw yang dikenal dengan istilah "musyawarah". Kata demokrasi memang tidak terdapat di dalam al-Qur'an dan al-Hadith, karena kata demokrasi berasal dari Barat atau Eropa yang masuk ke peradaban Islam.

Prinsip demokrasi pendidikan Islam dijiwai oleh prinsip demokrasi dalam Islam, atau dengan kata lain demokrasi pendidikan Islam merupakan implementasi prinsip–prinsip demokrasi Islam terhadap pendidikan Islam. Bentuk demokrasi pendidikan Islam adalah sebagai berikut: *pertama*, kebebasan bagi pendidik dan peserta didik. Kebebasan ini mencakup kebebasan berkarya, kebebasan dalam mengembangkan potensi, kebebasan

---

[2] Azyumardi Azra, "Kata Pengantar", dalam Tim ICCE UIN Jakarta, *Pendidikan Kewargaan: Demokrasi, HAM dam Masyarakat Madani* (Jakarta: ICCE UIN Syahid-TAF-Prenada Media, 2003), Edisi Revisi, xi.

dalam berpendapat. *Kedua*, persamaan terhadap peserta didik dalam pendidikan Islam. Islam memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik untuk mendapatkan pendidikan atau belajar. Abuddin Nata menyatakan bahwa peserta didik yang masuk di lembaga pendidikan tidak ada perbedaan derajat atau martabat, karena penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dalam suatu ruangan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan dari pendidik. Pendidik harus mengajar anak orang yang tidak mampu dengan yang mampu secara bersama atas dasar penyediaan kesempatan belajar yang sama bagi semua peserta didik. Pendidik harus mampu memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta didik untuk mendapatkan pendidikan. *Ketiga,* penghormatan akan martabat individu dalam pendidikan Islam. Demokrasi sebagai penghormatan akan martabat orang lain, maksudnya adalah seseorang akan memperlakukan orang lain sebagaimana dirinya sendiri. Secara historis prinsip penghormatan akan martabat individu telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad saw dalam praktek pembebasan kaum tertindas di Mekkah seperti memerdekakan budak.

Demokrasi berasal dari bahasa yunani, dari kata *"demos"* dan *"cratos",* demos berarti rakyat dan cratos berarti pemerintah. Jadi makna demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Dengan kata lain, demokrasi adalah pemerintahan di tangan rakyat.[3] Menurut Peter Salim, "Demokrasi adalah pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua negara".[4] Menurut Dede Rosyada, istilah demokrasi memang muncul dan dipakai dalam kajian politik, yang bermakna kekuasaan berada di tangan rakyat.[5]

Mekanisme berdemokrasi dalam politik tidak sepenuhnya sesuai dengan mekanisme demokrasi dalam lembaga pendidikan, namun secara substansif demokrasi membawa semangat dalam pendidikan, baik dalam perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi.[6]

---

[3] KBBI *Online*, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Diakses pada 18 Desember 2015).

[4] Dede Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokratis* (Jakarta: Kencana), 15.

[5] *Ibid.*

[6] *Ibid.*

Demokrasi pendidikan atau pendidikan yang demokratis adalah pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada peserta didik mencapai tingkat pendidikan yang setinggi-tinginya sesuai dengan kemampuannya. Dengan demikian, demokrasi pendidikan merupakan suatu pandangan yang mengutamakan persamaan kewajiban dan hak serta perlakuan oleh tenaga kependidikan terhadap peserta didik dalam proses pendidikan.

Pengembangan demokrasi pendidikan yang berorientasi pada cita-cita dan nilai demokrasi, akan selalu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: (1) Keadilan dalam pemerataan kesempatan belajar bagi semua warga negara dengan cara adanya pembuktian kesetiaan dan konsisten pada sistem politik yang ada; (2) Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sesuai dengan nilai-nilai luhurnya; (3) Wajib menghormati dan melindungi hak asasi manusia yang bermartabat dan berbudi pekerti luhur; (4) Mengusahakan suatu pemenuhan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran nasional dengan memanfaatkan kemampuan pribadinya, dalam rangka mengembangkan kreasinya ke arah perkembangan dan kemajuan iptek tanpa merugikan pihak lain.

Acuan pemahaman demokrasi dan demokrasi pendidikan dalam ajaran Islam bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadith. Di dalam al-Qur'an Surat Asy-Syura Ayat 38 Allah SWT berfirman:

والذين استجابوا لربهم واقاموا الصلوة وامرهم شورى بينهم ومما روقنهم ينفقون

"Dan (bagi) orang-rang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah diantara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang Kami berikan kepada mereka".[7]

Dan firman Allah Surat An-Nahl Ayat 43;

وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحى اليهم فسئلوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون

"Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui".[8]

---

[7] *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir Al-Quran, 1971), 789.

[8] *Ibid.*, 408.

Disebutkan pula dalam hadith Nabi Muhammad SAW;

طلب العلم فريضة على كل مسلم و مسلمة

”Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim (baik pria maupun wanita)”.

Dalil-dalil diatas mempertegas landasan teologis ditekankannya praktek demokrasi (musyawarah) dalam dunia Islam (pendidikan Islam). Bahkan, nilai-nilai demokrasi telah diterapkan oleh Nabi Muhammad saw, yang dikenal dengan istilah musyawarah. Salah satu contoh dapat dikemukakan bahwa ketika Nabi Muhammad saw menghadapi masalah strategi perang dan diplomasi dengan musuh, tergambar jelas bagaimana Nabi Muhammad menyelesaikan masalah sosial politik yang sedang dihadapi dan beliau selalu aspiratif dan dapat mentolerir adanya perbedaan pendapat diantara para sahabat.

Dalam mekanisme pengambilan keputusan terkadang beliau mengikuti mayoritas, dan terkadang mengambil keputusan dengan pendapat sendiri tanpa mengambil saran sahabat. Dengan kata lain Nabi Muhammad saw tidak menentukan suatu sistem, cara dan metode musyawarah secara baku, tetapi lebih bersifat variatif, fleksibel dan adaptif.[9]

Firman Allah swt dalam Q.S. Ali Imron Ayat 159, yang artinya: “Maka disebabkan rahmat Allahlah kamu–kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu, karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu, kemudian apabila kamu membulatkan tekad maka bertawakkallah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang–orang yang bertawakkal kepadanya”.

Ayat diatas ditujukan kepada Nabi Muhammad saw agar bermusyawarah dalam persoalan-persoalan yang dihadapi dengan para sahabatnya atau anggota masyarakat. Hal ini merupakan bukti kebijakan kepemimpinan Nabi Muhammad saw. serta kemuliaan budi pekertinya. Dari konsep musyawarah tersebut ada nilai-nilai yang menjadi prinsip dasar demokrasi. Nilai-nilai

[9] Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2010), 337.

tersebut diantaranya adalah prinsip kebebasan, persamaan, serta penghormatan terhadap martabat manusia.[10]

Demokratisasi dalam pendidikan memosisikan peserta didik aktif dan bebas –tidak ada paksaan- dalam menyampaikan pendapat. Abdurrahman Saleh Abdullah menyatakan bahwa pendidikan tidak boleh dipandang sebagai proses pemaksaan dari seorang pendidik untuk menentukan setiap langkah yang harus diterima oleh peserta didiknya secara individual. Dengan demikian dalam proses pembelajaran harus dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, yaitu dengan penghargaan terhadap kemampuan peserta didik, menerapkan persamaan kesempatan dan memperhatikan keragaman peserta didik sebagai insan yang harus dihargai kemampuannya dan diberi kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya tersebut. Dalam proses pembelajaran harus dihindari suasana belajar yang kaku, penuh dengan ketegangan, sarat dengan perintah dan instruksi yang membuat peserta didik menjadi pasif dan tidak bergairah, cepat bosan dan mengalami kelelahan.[11]

Demokratisasi merupakan proses menuju demokrasi. Dalam konteks ini, pendidikan merupakan sarana paling strategis bagi penciptaan demokratisasi. Menurut Azyumardi Azra, cara paling strategis "mengalami demokrasi"*(experiencing democracy)* adalah melalui apa yang disebut sebagai *democracy education* (pendidikan demokrasi). Pendidikan demokrasi dapat dipahami sebagai sosialisasi, diseminasi, dan aktualisasi konsep, sistem, nilai, budaya, dan praktek demokrasi melalui pendidikan.[12]

Pendidikan demokrasi berkaitan dengan bagaimana proses pendidikan itu dilaksanakan di tingkat lokal.[13] Di dalam pendidikan demokrasi, proses pembelajaran di kelas dapat diarahkan pada pembaharuan kultur dan norma keadaban. Fungsi pendidikan dalam proses pembelajaran yang demokratis adalah

---

[10] *Ibid.*

[11] *Ibid.*, 343.

[12] Azyumardi Azra, "Kata Pengantar", dalam Tim ICCE UIN Jakarta, *Pendidikan Kewargaan, Op.Cit.,* xi.

[13] Husaini Usman, "Menuju Masyarakat Madani Melalui Demokratisasi Pendidikan" dalam www.depdiknas.go.id/jurnal/28/htm. (Diakses pada 18 Desember 2015).

sebagai fasilitator, dinamisator, mediator, dan motivator. Sebagai fasilitator, pendidikan harus memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencoba menemukan sendiri makna informasi yang diterimanya. Sebagai dinamisator, pendidikan harus berusaha menciptakan iklim pembelajaran yang dialogis dan berorientasi pada proses. Sebagai mediator, pendidikan harus memberikan rambu-rambu atau arahan agar peserta didik bebas belajar. Sebagai motivator, pendidikan harus selalu memberikan dorongan agar peserta didiknya bersemangat dalam menuntut ilmu.

Pendidikan demokrasi menuntut adanya perubahan asas *subject matter oriented* menjadi *student oriented*. Suasana pendidikan yang demokratis senantiasa memerhatikan aspek egalitarian (kesetaraan atau sederajat dalam kebersamaan) antara pendidik dengan peserta didik. Pengajaran tidak harus *top down*, namun diimbangi dengan *bottom up.* Tidak ada lagi pemaksaan kehendak dari pendidik, tetapi akan terjadi tawar-menawar di antara kedua belah pihak dalam menentukan tujuan, materi, media, dan evaluasi hasil belajarnya. Dengan komunikasi struktural dan kultural antara pendidik dan peserta didik, akan terjadi interaksi yang sehat, wajar, dan bertanggungjawab. Peserta didik boleh saja berpendapat, berperasaan, dan bertindak sesuai dengan langkahnya sendiri, asalkan ada argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Peserta didik bukan saja memahami demokrasi, tetapi juga menjalani latihan seperti berdebat, menghargai pandangan dan harga diri orang lain, serta mematuhi aturan hukum yang diaplikasikan dalam *setting* diskusi.

Terkait erat dengan pendidikan demokrasi adalah pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan terkadang disebut juga sebagai pendidikan demokrasi. Azyumardi Azra menegaskan bahwa, dalam banyak hal, pendidikan demokrasi identik dengan "pendidikan kewargaan" *(civic education)*, meskipun pendidikan kewargaan/ kewarganegaraan lebih luas cakupannya daripada pendidikan demokrasi.[14] Tapi keduanya berupaya menumbuhkan *civic culture* dan *civility* di lingkungan pendidikan, yang pada gilirannya akan menjadi kontribusi penting bagi

[14] Azyumardi Azra, "Kata Pengantar", dalam Tim ICCE UIN Jakarta, *Pendidikan Kewargaan, Op.Cit.,* xii.

pengembangan demokrasi yang baik dan otentik pada negara-bangsa Indonesia. Senada dengan itu, Syafi'i Ma'arif mengemukakan bahwa proses penciptaan mentalitas dan kultur demokrasi kiranya dapat dilakukan melalui proses pendidikan. Dalam kaitan ini, perwujudan sistem pendidikan yang demokratis merupakan keniscayaan yang harus disikapi secara positif oleh seluruh komponen yang terlibat dalam proses pendidikan.[15]

Pendidikan Islam dan Pendidikan Kewarganegaraan dilihat dari sudut pendidikan nilainya merupakan bidang studi yang berorientasi dalam membentuk peserta didik yang beriman dan bertaqwa kepada Allah swt, memiliki pengetahuan yang luas dan berakhlakul karimah sekaligus membentuk warga negara yang baik sesuai dengan falsafah bangsa dan konstitusi negara Republik Indonesia.

Melalui keberhasilan penerapan Pendidikan Islam dalam memperhatikan akhlak atau tingkah laku peserta didiknya maka akan memudahkan bagi keberhasilan Pendidikan Kewarganegaraan untuk membentuk warga negara yang baik dan memiliki ketrampilan kewarganegaraan serta kecakapan hidup (*life skills*). Orientasi kedua bidang studi tersebut adalah membentuk warga negara yang baik dan memiliki akhlak mulia. Hal ini dapat dilihat dari dimensi nilai-nilai kewarganegaraan (*civics value*) yang mencakup penguasaan atas nilai religius, norma dan moral luhur serta mengamalkan ajaran-ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Upaya mensinergiskan pendidikan Islam, demokratisai, dan kewarganegaraan, perlu dilakukan dengan menjadikan Islam sebagai sumber nilai untuk membangun karakter bangsa sehingga melahirkan pendidikan Islam yang berwawasan kebangsaan. Dengan demikian, umat Islam (peserta didik) akan menjadi umat yang shaleh sekaligus menjadi warga negara yang baik. Pendidikan Islam dan Pendidikan Kewarganegaraan memiliki kemiripan dalam hal tujuannya yaitu menanamkan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta budi pekerti atau akhlak yang luhur. Di samping menanamkan sikap budi pekerti yang luhur,

---

[15] Ahmad Syafi'i Ma'arif, "Ketika Pendidikan Tidak Membangun Kultur Demokrasi", Prawacana untuk Zamroni, *Pendidikan untuk Demokrasi: Tantangan Menuju Civil Society* (Yogyakarta: Bigraf, t.t), viii-ix.

Pendidikan Kewarganegaraan juga membentuk peserta didik agar dapat memahami, mengamalkan dan melestarikan nilai-nilai Pancasila sehingga menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab mencakup pada dimensi pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan dan nilai-nilai kewarganegaraan. Sedangkan di dalam Pendidikan Islam, untuk kepentingan pendidikan dalam mencapai dan mengamalkan moral atau akhlak dalam kehidupan sehari-hari, perlu dilakukan melalui proses yang dinamis.

Akhlak dalam Pendidikan Islam dan Pendidikan Kewarganegaraan mengandung unsur yang sama. Hal ini sesuai dengan sifat bangsa Indonesia yang religius sehingga moral Pancasila lebih banyak mengacu pada tatanan nilai yang ada dalam agama. Dengan demikian karena secara materiil atau kajian isinya merupakan pendidikan yang sama-sama berorientasi dalam membentuk peserta didik dan warga negara yang baik, beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan konstitusi dan falsafah bangsa Indonesia.

Pendidikan Kewarganegaraan yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *civic education* (artinya, Ilmu pengetahuan kewarganegaraan, hubungan seseorang dengan orang lain dalam perkumpulan-perkumpulan yang terorganisasir, hubungan seorang individu dengan negera). Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan (*Civic Education*) adalah suatu pendidikan yang berusaha menggabungkan unsur-unsur substantif yang meliputi demokrasi, hak-hak asasi manusia, dan masyarakat madani melalui model pembelajaran yang demokratis.

Pendidikan Islam dan Pendidikan Kewarganegaraan merupakan dua materi pelajaran yang relatif dekat antara yang satu dengan yang lainnya. Kedua materi ini mempunyai orientasi penekanan pada aspek pembinaan dan pengembangan kepribadian siswa, yang berakhlak mulia, beriman, bertaqwa kepada Allah swt., sebagai warga negara yang menyadari akan status, hak, dan kewajibannya.[16]

---

[16] Abd Aziz Albone, *Pendidikan Agama Islam dalam Perspektif Multikulturalisme* (Jakarta: PT. Saadah Cipta Mandiri, 2006), 11.

Pendidikan Islam dan Pendidikan Kewarganegaraan memiliki orientasi yang berdekatan, yaitu sama-sama berorientasi pada pengembangan kepribadian sebagai warga muslim sekaligus warga Negara Indonesia. Pendidikan Islam juga memfokuskan pada peningkatan potensi spiritual dan membentuk peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT dan berakhlak mulia yang mencakup etika, budi pekerti, moral sebagai perwujudan dari pendidikan agama.[17] Peningkatan potensi spiritual mencakup pengenalan, pemahaman nilai-nilai keagamaan, yang pada akhirnya bertujuan pada optimalisasi potensi yang dimiliki manusia yang aktualisasinya mencerminkan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan materi pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajiban untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, berakhlak mulia dan terampil.

Pendidikan Islam, Demokratisasi dan Kewarganegaraan di Beberapa Negara

Di Indonesia, demokrasi pendidikan juga dapat diartikan sebagai hak setiap warga negara atas kesempatan yang seluas–luasnya untuk menikmati pendidikan, yang sesuai dengan bunyi pernyataan Undang–Undang No. 20 Tahun 2003 pasal 4 ayat (1), yaitu: "Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Demokrasi Pendidikan bukan hanya sekedar prosedur, tetapi juga nilai–nilai pengakuan dalam kehormatan dan martabat manusia. Melalui upaya demokratisasi pendidikan diharapkan mampu mendorong munculnya individu yang kreatif, kritis, dan produktif dalam kehidupan.

Pengakuan terhadap hak asasi setiap individu anak bangsa untuk menuntut pendidikan pada dasarnya telah mendapatkan pengakuan secara legal sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang–Undang Dasar 1945 pasal 31 (1) yang berbunyi bahwa "Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan". Oleh

[17] Abdurrahman Mas'ud, *Pendidikan Islam* (Malang: Hak Cipta, 2008), 13.

karena itu seluruh komponen bangsa yang mencakup orang tua, masyarakat, dan pemerintah memiliki kewajiban dalam bertanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Demokrasi Pendidikan merupakan pandangan hidup yang mengutarakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama didalam berlangsungnya proses pendidikan antara pendidik dan peserta didik, juga dengan pengelola pendidikan.

Demokrasi dalam ranah pendidikan adalah gagasan atas pandangan hidup yang mengutamakan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara dalam berlangsungnya proses pendidikan. Dalam proses tersebut, dunia pendidikan dituntut pula untuk berkembang dinamis mewujudkan manusia kritis dan kreatif yang mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan sekitar.

Dalam Islam, sistem demokrasi sendiri telah dibenarkan dan dipraktekkan oleh beberapa negara Muslim. Penerimaan ini disebabkan apa yang dianggap prinsip-prinsip demokrasi sesungguhnya juga terkandung dalam ajaran Islam seperti keadilan (*'adl*), persamaan (*musawah*), dan musyawarah (*syura*). Dengan demikian, konsep demokrasi dalam pendidikan Islam merupakan suatu tawaran yang dapat diterima untuk mewujudkan tujuan membentuk manusia yang taat pada ajaran Islam itu sendiri. Agar umat Islam dapat berkompetisi dalam peradaban global, maka konsep tersebut perlu diimplementasikan dalam sistem pendidikan Islam saat ini.

Di Indonesia, secara umum, pendidikan umum lebih bisa menerapkan sistem demokrasi, dibandingkan dengan pesantren. Di dalam pesantren, sistemnya masih cenderung bersifat sentralistik atau semu tersentral pada peran seorang kiyai atau ulama yang menjadi pengasuh dalam pesantren. Sistem sentralisasi yang ada dalam pesantren ibarat sistem pendidikan di bawah kekuasaan rezim orde baru yang semua tersentral dalam satu muara. Hal itulah yang kemudian menuntut lembaga pendidikan Islam (semisal pesantren) untuk lebih kreatif dan menuju pada sistem yang demokratis, terutama dalam hal pengelolaan pendidikannya.

Sementara itu di Mesir, Kementerian pendidikan menyatakan bahwa tujuan utama pendidikan adalah sebagai berikut: (1). Pendidikan dimaksudkan untuk menegakkan demokrasi dan

persamaan kesempatan serta pembentukan individu-individu yang demokratis. (2). Pendidikan juga dimaksudkan sebagai upaya pembangunan bangsa secara menyeluruh, yaitu menciptakan hubungan fungsional antara produktivitas pendidikan dan pasar kerja. (3). Pendidikan juga diarahkan pada penguatan rasa kepemilikan individu terhadap bangsa, dan penguatan atas budaya dan identitas Arab. (4). Pendidikan harus mampu menggiring masyarakat pada pendidikan sepanjangan hayat melalui peningkatan diri dan pendidikan diri sendiri. (5). Pendidikan harus mencakup pengembangan ilmu dan kemauan baca tulis, berhitung, mempelajari bahasa-bahasa selain bahasa Arab, cipta seni, serta pemahaman atas lingkungan. (6). Pendidikan bertujuan pula sebagai kerangka kerjasama dalam pengembangan kurikulum dan penilaian.[18]

Sebagai negara yang padat penduduk dan memiliki banyak lembaga pendidikan guru dan siswa, Mesir telah mengembangkan suatu sistem pelatihan guru melalui pelatihan jarak jauh (*distance learning/training*) dengan menggunakan keunggulan teknologi informasi. Model ini juga penting untuk dikembangkan di Indonesia agar pelayanan pendidikan dan pelatihan kepada guru dapat dilakukan lebih cepat dan efisien.

Sistem penjenjangan karier guru secara fungsional yang diselenggarakan di Mesir tampaknya lebih bergradasi dan dapat menciptakan profesionalisme pendidik. Sistem yang diatur mulai dari status guru sebagai *assistant teacher, teacher, senior teacher,* sampai *master teacher*. Jenjang status guru seperti itu dapat berpengaruh positif terhadap jenjang karier guru dan pembinaan profesi guru yang lebih terstruktur.

Sebagai negara yang berpenduduk mayoritas Muslim dan tradisi agama yang kuat, Mesir memiliki sistem pembelajaran agama Islam yang sangat kuat. Standar untuk pendidikan Islam pun dilakukan dengan standar yang lebih menjamin lulusan pendidikan keagamaan agar memiliki pengetahuan dan pemahaman agama yang kuat. Karena itu, dalam pengembangan kurikulum dan evaluasi pendidikan agama, pendidikan Islam di Mesir sering menjadi rujukan negara-negara Islam lainnya.

[18] Nur Hamim, *Pendidikan di Berbagai Negara di Dunia* (Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2012), 355.

Misalnya, sistem pendidikan al-Azhar Cairo terbuka untuk menerima calon mahasiswa dari berbagai lulusan sekolah menengah namun mereka harus lulus seleksi, memiliki ijazah yang diakui setara, dan harus mengikuti matrikulasi bagi mereka yang dianggap belum cukup dapat melanjutkan kuliah.

Upaya demokratisasi pendidikan Islam di Mesir juga dilakukan. Kesempatan berpendidikan bagi masyarakatnya ditingkatkan. Mesir telah mengalami transformasi cepat dalam hal pendidikan. Berdasarkan data Dirjen Dikti 1997, yang dikutip oleh Abd. Rachman Assegaf, dalam satu juta penduduk di Mesir terdapat 400 doktor, suatu angka yang signifikan bila dibandingkan dengan potensi *human resources* di negara-negara Islam anggota OKI lainnya. Dalam skala yang sama, Indonesia hanya mencapai angka 65 doktor per satu juta orang.[19]

Sementara itu, di Iran upaya meningkatkan pemerataan pendidikan juga dilakukan oleh Shah Reza Pahlevi. Dalam rangka memberantas kebodohan dan buta huruf, Pahlevi mendirikan Badan Pemberantasan Buta Huruf (*Literacy Corps*) dan sekolah-sekolah yang dapat menampung anak-anak untuk belajar baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan.[20] Modernisasi di bidang pendidikan terus dilakukan. Demokratisasi sistem politik (yang berimbas pada demokratisasi pendidikan –*pen.*) terus digalakkan. Pengakuan terhadap hak-hak perempuan juga terus disuarakan.[21]

Gerakan feminisme di Iran terus mengemuka. Perempuan tidak lagi dipandang sebelah mata. Perempuan tidak lagi dijadikan sebagai alat konsumerisme dan eksploitasi. Perempuan dianggap setara hak-haknya di ranah publik. Hal itu terutama terjadi di Iran pasca revolusi Iran. Iran merupakan negara Timur tengah yang dianggap paling afirmatif terhadap perempuan dibandingkan dengan negara-negara Timur Tengah yang lain. Hak itu terutama terjadi sejak adanya upaya modernisasi pendidikan Islam.[22] Modernisasi pendidikan di Iran antara lain dilakukan dengan

---

[19] Abd. Rachman Assegaf, *Internasionalisasi Pendidikan: Sketsa Perbandingan Pendidikan di Negara-Negara Islam dan Barat* (Yogyakarta: Gama Media, 2003), 63.

[20] *Ibid.,* 76.

[21] *Ibid.,* 80.

[22] *Ibid.*, 84-85.

penerapan proses demokratisasi dalam dunia pendidikan demi mencapai kondisi warga negara yang lebih baik.

Di Cina, upaya demokratisasi pendidikan dilakukan dengan model *intellectual democracy*. Ini merupakan langkah penting untuk memicu daya kritis dan kreativitas peserta didik. *Intellectual democracy* berasal dari bahasa Inggris; *intellectual* dan *democracy*. *Intellectual* berarti cendekiawan, cerdik pandai, menurut akal, mengenai akal, menurut kecerdasan, dan intelektual; sedangkan *democracy* berarti demokrasi. Berdasarkan banyak literatur, dalam kaitannya dengan politik, demokrasi berasal dari bahasa Yunani; demos dan kratos yang bermakna demos itu rakyat, sedangkan kratos itu pemerintahan; jadi demokrasi berarti pemerintahan rakyat (dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat). Dalam konteks pendidikan, berarti pendidikan itu "dari", "oleh" dan "untuk" peserta didik (masyarakat).

Intellectual democracy (demokrasi intelektual) ini diterapkan oleh Confusius (seorang filsuf Cina abad ke-6 SM.) dalam memberikan pendidikan kepada murid-muridnya di sekolah (baca: kelas).[23] Dalam penerapan *intellectual democracy*, seorang pendidik harus memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada murid agar melakukan percobaan-percobaan sendiri guna menemukan kebenaran-kebenaran. Prinsipnya, bahwa maju dan berkembangnya kecerdasan seorang murid itu ditentukan oleh murid itu sendiri. Guru hanya bertindak sebagai fasilitator dan pendamping murid.[24]

Dalam penerapan *intellectual democracy*, guru tidak boleh sedikitpun mendiktekan –secara paksa- suatu kebenaran kepada murid-muridnya. Murid-murid harus berfikir mandiri, dan apabila kebenaran menurut mereka bertentangan dengan kebenaran yang diajarkan oleh gurunya, mereka diberi kesempatan untuk mengemukakan argumentasinya dan mendiskusikannya guna memberikan kejelasan akan kebenaran yang ditemukannya. Inilah

---

[23] Mengenai pemikiran dan tradisi Confucian, lihat Tu Wei-ming (Ed.), *Confucian Traditions in East Asian Modernity* (US America: Harvard University Press, 1996).

[24] Muhammad Fahmi, "*Intellectual Democracy:* Paradigma Pendidikan Islam Era Posmodern" *Jurnal Nizamia* (Surabaya: Fak. Tarbiyah IAIN Sunan Ampel, 2007)

konsep *intellectual democracy*, yakni suatu konsep pembelajaran cerdik pandai yang bersifat demokratis (dari peserta didik, oleh peserta didik, dan untuk peserta didik).

Dalam *intellectual democracy*, peserta didik harus diberi kemandirian untuk mengembangkan intelektualitasnya. Jika murid diberi kemandirian dalam berfikir, maka segala potensi yang dimiliki akan teraktualisasikan dan terarahkan secara progresif; sebaliknya, jika murid dikekang/ dihegemoni dalam proses pembelajaran, maka potensi yang dimiliki tidak akan tersalurkan secara progresif. *Intellectual democracy* mengajarkan kepada murid-muridnya agar berpikir mandiri, tidak mudah menerima pendapat orang lain dan harus melakukan analisa kritis. Guru harus rela menerima kritik dari murid-muridnya dan dari siapa saja. Dalam teori *intellectual democracy*, penerimaan murid dilakukan bukan atas dasar keturunan dan derajat seseorang tetapi berdasarkan pada kemauan dan kesungguhannya.

Penerapan pembelajaran dengan model *intellectual democracy* memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada murid agar melakukan percobaan-percobaan sendiri guna menemukan kebenaran-kebenaran. Di samping itu, pendidik harus memegang prinsip timbal balik (*principle of reciprocity*) dalam pendidikan dan pembelajaran kepada peserta didik. Prinsip timbal balik ini mengindikasikan bahwa hubungan guru-murid adalah dalam posisi subjek-subjek; bukan subjek-objek. Objek dalam pembelajaran adalah realitas problem sosial yang dialami masyarakat – disamping materi-materi *teks book* sebagai penguatan domain teoritis.

Model pendidikan dan pengajaran jenis *intellectual democracy* telah banyak diujicobakan dan dikembangkan dalam sistem pendidikan modern –bahkan di era sekarang (posmodern), yakni dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik untuk mencari dan melakukan berbagai percobaan sendiri guna memperoleh masukan-masukan pengetahuan baru yang bermanfaat bagi yang bersangkutan dan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, kemudian jika hasilnya positif dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat luas.[25]

---

[25] Lasiyo, *Neo-Confucianisme* (Yogyakarta: Fak. Filsafat UGM, 1993).

Intellectual democracy ini kemudian berkembang sedemikian rupa sehingga seseorang dapat berfikir kritis dan tidak begitu saja menerima fakta yang dihadapi, akan tetapi justru mencoba mencari berbagai alternatif baru dalam usaha untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam masyarakat. Pembelajaran model *intellectual democracy* ini dapat dikatakan sejalan dengan model demokrasi pendidikan (*education democracy*) atau pendidikan dialogis (*education of dialogue*) ala Paulo Freire (Brazil), yang saat ini banyak diterapkan di Indonesia khususnya, dan dunia pendidikan pada umumnya.

Di Brazil, pada tahun 70-an dan sebelumnya, terkenal dengan budaya bisu, diperbudak, tiruan dan anti demokrasi.[26] Praktek dan budaya pendidikannya tidak diarahkan untuk kecerdasan dan daya kritis masyarakatnya. Kemudian Freire muncul dengan ide-ide pendidikan pembebasannya. Freire juga terkenal dengan ide pendidikan kontekstual. Pendidikan kontekstual (berbasis realitas sosial) adalah sebuah teori dan model pendidikan yang mengupayakan peserta didik untuk menjadi subjek dalam rangka menjawab persoalan-persoalan yang muncul dalam realitas sosial. Menurut Freire, manusia adalah pencipta sejarahnya sendiri. Keberadaan manusia dalam sistem hadap masalah sebagai makhluk yang berada dalam proses "menjadi" dan belum selesai serta tidak lengkap dalam menghadapi realitas. Kodrat tidak selesainya manusia dalam menghadapi persoalan sosial mengakibatkan pendidikan menjadi suatu kegiatan yang berlangsung tiada batas sebagai praktek pembebasan.[27] Apabila selama ini pendidikan memitoskan realitas dunia untuk menutupi realitas yang sebenarnya, maka dalam sistem pendidikan kontekstual (hadap masalah) realitas sosial harus menjadi demitologi.

Penerapan pendidikan kontekstual akan dapat menumbuhkan interaksi manusia dengan dunianya, karena tugas pendidikan kontekstual adalah problematisasi realitas sosial (politik, budaya) menjadi bagian dari manusia sebagai peserta didik. Pedagogi

---

[26] Paulo Freire, *Pendidikan yang Membebaskan,* Terj. Martin Eran (Jakarta: Melibas, 2000), 27.

[27] Paulo Freire, *Pendidikan sebagai Praktek Pembebasan*, terj. Nugroho (Jakarta: Gramedia, 1984).

Freire membuat tiga skema dalam merumuskan pendidikan kontekstual. *Pertama*, investigasi, yaitu pengujian dan penemuan kesadaran manusia yang bersifat tahayul, naif, dan kritis. *Kedua*, tematisasi, yaitu pengujian semesta tematis dengan reduksi, penemuan tema-tema generatif baru yang tersirat dalam tema-tema sebelumnya. *Ketiga*, problematisasi, yaitu penemuan situasi-situasi rumit dan tindakan-tindakan terbatas yang mengarah pada praktek otentik tindakan kultural permanen untuk pembebasan.

Dalam rangka merealisasikan hal tersebut, maka proses yang dilakukan dalam pembelajaran pendidikan harus bersifat dialogis. Ini perlu dilakukan dalam rangka menghargai potensi, bakat, dan harkat manusia sebagai peserta didik. Proses dialogis juga diupayakan untuk memberikan penyadaran kepada peserta didik akan realitas diri dan lingkungannya. Di sini kemudian penting untuk mengkaji disiplin keilmuan dari beragam perspektif, baik teoritis maupun praktis,[28] demi menyambungkan antara idealitas dan realitas.

Di Amerika, gagasan demokratisasi pendidikan banyak disuarakan oleh John Dewey. Menurut Dewey, pendidikan itu memberikan kesempatan hidup. Hidup itu menyesuaikan diri dengan masyarakat. Kesempatan diberikan dengan jalan berbuat secara individual maupun kelompok untuk mendapatkan pengalaman sebagai suatu modal berharga dalam berfikir kritis secara produktif dan berbuat susila. Sekolah yang dikehendaki Dewey adalah "sekolah kerja". Masyarakat harus menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan warganya untuk pendidikannya, agar tidak bergantung pada dogma, melainkan berfikir secara bebas, disiplin, obyektif, kreatif, dan dinamis.[29] Bagi Dewey peserta didik memiliki empat (4) insting; yakni insting sosial, membentuk/membangun, menyelidiki, dan kesenian.

Pendidikan memang merupakan kebutuhan hidup. Pendidikan merupakan suatu transmisi yang dilakukan melalui komunikasi.

---

[28] Akh. Muzakki, "Perspektif Pendidikan tentang Pengembangan Keilmuan Islam Multidisipliner", dalam Nur Syam (Ed.), *Integrated Twin Towers: Arah Pengembangan Islamic Studies Multidisipliner* (Surabaya: SAP, 2010), 418-438.

[29] Ini mengacu pada pandangan Ag. Soejono, dalam Muis Sad Iman, *Pendidikan Partisipatif* (Yogyakarta: Safiria Insani Press & MSI UII, 2004), 71.

Komunikasi adalah proses dari pernyataan empiris dan proses modifikasi watak, sehingga menjadi suatu keadaan pribadi. Hal ini dapat dikatakan bahwa setiap rancangan sosial memiliki bagian penting dari sebuah kelompok, dari yang tertua hingga yang termuda. Sebagai sebuah masyarakat yang sangat kompleks dalam struktur maupun sumber daya, membutuhkan pengajaran formal serta proses pembelajaran.[30]

Pendidikan itu "*preparing or getting ready for some future duty or privilege*" (mempersiapkan atau mendapat kesiapan untuk banyak tugas atau tanggung jawab di masa mendatang). Lebih lanjut, menurut Dewey, "*the notion that education is an unfolding from within appears to have more likeness to the conception of growth which has been set forth.*[31] Dengan demikian pemikiran Dewey tentang pendidikan lebih condong kepada suatu konsepsi pendidikan yang harus dibentangkan dari yang tampak dan memiliki banyak kesamaan konsepsi pertumbuhan yang menjadi perlengkapan seterusnya.[32]

Pendidikan harus fleksibel dan demokratis. Dewey menghendaki adanya asas fleksibilitas demi memajukan pendidikan. Untuk tujuan itu, menurut Dewey, pendidikan harus bersifat demokratis; dan untuk mencapai demokratisasi pendidikan diperlukan modal yang besar, sehingga –bisa dikatakan- bahwa Dewey sangat mendukung terhadap program-program kapitalisme. "*We still find a view put forth as to an intrinsic and necessary connection between democracy and capitalism which has a psychological foundation and temper. For it is only because of belief in ascertain theory of human nature that the two are said to be siamese twins, so that attack upon one is threat directed at the life of the other*", kata Dewey.[33]

---

[30] John Dewey, *Democracy and Education, an Introduction to the Philosophy of Education*, Twenty-Third Printing (USA: The Macmillan Company, 1916), 11.

[31] *Ibid.,* 79.

[32] Muis Sad Iman, *Op.Cit.,* 86.

[33] John Dewey, *Freedom and Culture* (Capricorn Books Edition, 1963), 105

Analisis Komparatif

Pendidikan merupakan investasi sumber daya manusia jangka panjang yang mempunyai nilai strategis bagi kelangsungan peradaban manusia di dunia. Oleh sebab itu, hampir semua negara menempatkan variabel pendidikan sebagai sesuatu yang penting dan utama dalam konteks pembangunan bangsa dan negara. Begitu juga Indonesia menempatkan pendidikan sebagai sesuatu yang penting dan utama. Hal ini dapat dilihat dari isi pembukaan UUD 1945 Alinea IV yang menegaskan bahwa salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam kajian demokrasi pendidikan, pendidikan dapat dipahami sebagai sebuah alternatif untuk ikut serta memecahkan berbagai masalah yang dihadapi pemerintah dan masyarakat.

Berbagai materi pendidikan penting diberikan kepada masyarakat, terutama pendidikan agama (Islam) dan Kewarganegaraan. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat (2) menyebutkan tentang "Kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu". Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Indonesia diberikan kebebasan untuk menganut agamanya dan kepercayaannya masing-masing, dalam arti penduduk Indonesia beragama dan ber-Ketuhanan Yang Maha Esa.

Penetapan pendidikan Islam sebagai mata pelajaran wajib di sekolah merupakan kebijakan yang sangat penting dalam pembangunan nasional Indonesia. Hal ini mengingat bangsa Indonesia merupakan bangsa yang berasaskan Pancasila dan menjadikan agama sebagai unsur penting dalam pembangunan nasionalnya. Sejak awal kemerdekaan sampai era reformasi sekarang ini pemerintah menempatkan pendidikan agama sebagai mata pelajaran inti di sekolah-sekolah, baik negeri maupun swasta.

Apabila dikaitkan dengan tujuan pendidikan nasional, pendidikan Islam merupakan salah satu mata pelajaran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pencapaian tujuan pendidikan nasional. Oleh karenanya pendidikan Islam memberikan sumbangsih bagi nilai-nilai demokrasi dan pengembangan pendidikan kewarganegaraan. Salah satu tujuan utama pendidikan nasional seperti tercantum dalam UUSPN adalah pembentukan manusia yang bertaqwa dan berbudi

pekerti luhur. Kedua tujuan ini merupakan ciri dan watak dasar dari kepribadian bangsa Indonesia. Arah pendidikan di Indonesia selalu mengedepankan aspek kepribadian dalam semua jenjangnya. Kepribadian yang kuat merupakan modal utama bagi setiap peserta didik dalam membangun masa depannya serta mampu menghadapi arus besar globalisasi.[34]

Dalam pada itu, pendidikan yang mengarah pada pembangunan watak dan kepribadian adalah pendidikan kewarganegaraan yang memiliki visi terwujudnya suatu pelajaran yang berfungsi sebagai sarana pembinaan watak bangsa (*nation and character building*) dan pemberdayaan warga negara. Adapun misi pelajaran ini adalah membentuk warga negara yang baik, yakni warga negara yang sanggup melaksanakan hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.[35]

Di Mesir, Pemerintah menyatakan bahwa pengembangan secara ilmiah harus dilakukan dalam sistem pendidikan. Mesir memprogramkan wajib belajar, masyarakatnya harus pandai dalam hal baca tulis dan terdidik, harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menjadi masyarakat yang produktif, pendidikan juga harus fleksibel, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Pendidikan di Mesir dimaksudkan untuk pembangunan bangsa secara menyeluruh, yaitu menciptakan hubungan fungsional antara produktivitas pendidikan dan pasar kerja, diarahkan pada penguatan rasa kepemilikan individu terhadap bangsa, dan penguatan atas budaya dan identitas Arab, menggiring masyarakat pada pendidikan sepanjang hayat melalui peningkatan diri dan pendidikan diri sendiri, mencakup pengembangan ilmu dan kemampuan tulis baca, berhitung, mempelajari bahasa-bahasa selain bahasa Arab, cipta seni, serta pemahaman atas lingkungan.

Sasaran pendidikan di Mesir tersebut dapat dikatakan sebagai bagian dari pendidikan kewarganegaraan di negara tersebut.

---

[34] Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP-UPI, *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan Bagian III* (Bandung: PT Imtima, 2009), 1.

[35] BSNP dan Direktorat Pembinaan SMP Ditjen Mandikdamen Depdiknas, *Contoh/Model Slabus Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan SMP,* 2006, 1.

Sasaran pendidikan di Mesir terutama ditujukan kepada pemberian kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan di tengah masyarakat. Ini merupakan bagian dari potret pendidikan yang demokratis. Perbaikan pendidikan hendaknya dimulai dengan memberikan kesempatan belajar yang sama antara pria dan wanita, sebab wanita itu memegang posisi yang menentukan dalam pendidikan. Wanita yang terdidik akan menjadi istri dan ibu rumah tangga yang berhasil. Mereka yang diharapkan melahirkan putra-putri cerdas.[36]

Di Iran gerakan feminisme terus mengemuka. Perempuan tidak lagi dipandang sebelah mata. Perempuan tidak lagi dijadikan sebagai alat konsumerisme dan eksploitasi. Perempuan dianggap setara hak-haknya di ranah publik. Hal itu terutama terjadi di Iran pasca revolusi Iran. Iran merupakan negara Timur tengah yang dianggap paling afirmatif terhadap perempuan dibandingkan dengan negara-negara Timur Tengah yang lain. Hak itu terutama terjadi sejak adanya upaya modernisasi pendidikan Islam.[37] Modernisasi pendidikan di Iran antara lain dilakukan dengan penerapan proses demokratisasi dalam dunia pendidikan demi mencapai kondisi warga negara yang lebih baik.

Di Cina, upaya demokratisasi pendidikan dan pengembangan pendidikan kewarganegaraan dilakukan dengan model *intellectual democracy*. Ini merupakan langkah penting untuk memicu daya kritis dan kreativitas peserta didik. *Intellectual democracy* berasal dari bahasa Inggris; *intellectual* dan *democracy*. *Intellectual* berarti cendekiawan, cerdik pandai, menurut akal, mengenai akal, menurut kecerdasan, dan intelektual; sedangkan *democracy* berarti demokrasi. Berdasarkan banyak literatur, dalam kaitannya dengan politik, demokrasi berasal dari bahasa Yunani; demos dan kratos yang bermakna demos itu rakyat, sedangkan kratos itu pemerintahan; jadi demokrasi berarti pemerintahan rakyat (dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat). Dalam konteks pendidikan,

---

[36] Salah seorang pembaharu Mesir yang mengemukakan pendapat senada dengan pendapat ini adalah Qasim Amin, yang terkenal sebagai pelopor gerakan emansipasi perempuan Muslimah khususnya di Mesir. Lihat Qasim Amin, *Takhrir al-Mar'ah* (Kairo: Sadar al-Ma'arif, 1970), 42.

[37] *Ibid.*, 84-85.

berarti pendidikan itu "dari", "oleh" dan "untuk" peserta didik (masyarakat).

Hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain –menurut *intellectual democracy*- harus dilakukan secara demokratis. Proses demokratisasi antar manusia bisa dimulai melalui jalur pendidikan. Dalam pandangan tersebut, semua manusia bebas berfikir. Meski demikian, murid-murid harus selalu berhati-hati dan tidak sembarangan dalam berfikir, dan apa yang telah difikirkan diupayakan dapat menjawab problem kehidupannya.

Intellectual democracy ini kemudian berkembang sedemikian rupa sehingga seseorang dapat berfikir kritis dan tidak begitu saja menerima fakta yang dihadapi, akan tetapi justru mencoba mencari berbagai alternatif baru dalam usaha untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam masyarakat. Pembelajaran model *intellectual democracy* ini dapat dikatakan sejalan dengan model demokrasi pendidikan (*education democracy*) atau pendidikan dialogis (*education of dialogue*) ala Paulo Freire (Brazil), yang saat ini banyak diterapkan di Indonesia khususnya, dan dunia pendidikan pada umumnya.

Di Brazil, penerapan demokratisasi pendidikan dalam rangka mengembangkan pendidikan kewarganegaraan banyak disuarakan oleh Paulo Freire. Dengan konsep pendidikan pembebasan, pendidikan untuk penyadaran dan humanisasi, Freire melakukan gerakan pendidikan di Brazil dan beberapa negara berkembang demi memberantas kondisi buta huruf yang dialami terutama oleh masyarakat miskin.

Di Amerika, konsep pendidikan demokrasi demi memajukan generasi bangsa banyak disuarakan oleh John Dewey. Pendidikan harus fleksibel dan demokratis. Dewey mengehendaki adanya asas fleksibilitas demi memajukan pendidikan. Untuk tujuan itu, menurut Dewey, pendidikan harus bersifat demokratis; dan untuk mencapai demokratisasi pendidikan diperlukan modal yang besar, sehingga –bisa dikatakan- bahwa Dewey sangat mendukung terhadap program-program kapitalisme.

Bagaimanapun desain dan aplikasinya, terkait dengan pendidikan, demokratisasi dan kewarganegaraan, hampir di negara-negara maju dan berkembang, selalu diupayakan

realisasinya demi mencapai peradaban warga negara yang lebih baik. Pendidikan memang menjadi instrumen penting bagi perkembangan dan kemajuan sebuah bangsa dan negara melalui warga negara yang terdidik dengan baik.

Kesimpulan

Uraian diatas menegaskan bahwa ada hubungan relasional dan fungsional antara pendidikan Islam, demokratisasi dan pendidikan kewarganegaraan. Praktek-praktek demokratisasi perlu diterapkan dalam dunia pendidikan Islam untuk membekali peserta didik dengan pemahaman, sikap-sikap dan keterampilan demokratis yang dapat difungsikan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan Islam juga sangat erat kaitannya dengan pendidikan kewarganegaraan. Dua materi pedidikan ini sangat mirip orientasinya, yakni sama-sama ingin menanamkan nilai-nilai moral yang luhur bagi peserta didik (generasi bangsa) demi kepentingan bangsa dan negara.

Di beberapa negara seperti Indonesia, Mesir, Iran, Cina, Brazil, Amerika, upaya demokratisasi pendidikan atau pendidikan demokratis terus diperjuangkan penerapannya. Hal ini memang menjadi kebutuhan bagi setiap negara untuk menuju kondisi dan situasi yang lebih baik bagi setiap warga negaranya. Ide-ide demokratisasi pendidikan beragam macam istilahnya, tetapi semuanya bermuara pada tujuan ingin semakin memberdayakan peserta didiknya, dan nantinya akan berguna bagi kepentingan bangsa dan negara.

Daftar Rujukan

Al-Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir Al-Quran, 1971.

Amin, Qasim. *Takhrir al-Mar'ah*. Kairo: Sadar al-Ma'arif, 1970.

Aziz Albone, Abd. *Pendidikan Agama Islam dalam Perspektif Multikulturalisme*. Jakarta: PT. Saadah Cipta Mandiri, 2006.

Azra, Azyumardi. "Kata Pengantar", dalam Tim ICCE UIN Jakarta, *Pendidikan Kewargaan: Demokrasi, HAM dam Masyarakat Madani*. Edisi Revisi. Jakarta: ICCE UIN Syahid-TAF-Prenada Media, 2003.

BSNP dan Direktorat Pembinaan SMP Ditjen Mandikdamen Depdiknas*, Contoh/Model Slabus Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan SMP,* 2006.

Dewey, John. *Democracy and Education, an Introduction to the Philosophy of Education*, Twenty-Third Printing. USA: The Macmillan Company, 1916.

Djohar, *Reformasi dan Masa Depan Pendidikan di Indonesia Sebuah Rekonstruksi Pemikiran*. Yogyakarta: IKIP Negeri Yogyakarta, 1999.

Fahmi, Muhammad. "*Intellectual Democracy:* Paradigma Pendidikan Islam Era Posmodern" *Jurnal Nizamia.* Surabaya: Fak. Tarbiyah IAIN Sunan Ampel, 2007.

Freire, Paulo. *Pendidikan sebagai Praktek Pembebasan*, terj. Nugroho. Jakarta: Gramedia, 1984.

Hamim, Nur. *Pendidikan di Berbagai Negara di Dunia.* Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2012.

KBBI *Online*, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses pada 18 Desember 2015.

Lasiyo, *Neo-Confucianisme.* Yogyakarta: Fak. Filsafat UGM, 1993.

Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kewiraan Buku Induk Pendidikan Kewiraan/Kewarganegaraan*. Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional, 1997.

Mas'ud, Abdurrahman. *Pendidikan Islam*. Malang: Hak Cipta, 2008.

Muzakki, Akh. "Perspektif Pendidikan tentang Pengembangan Keilmuan Islam Multidisipliner", dalam Nur Syam (Ed.), *Integrated Twin Towers: Arah Pengembangan Islamic Studies Multidisipliner.* Surabaya: SAP, 2010.

Rachman Assegaf, Abd. *Internasionalisasi Pendidikan: Sketsa Perbandingan Pendidikan di Negara-negara Islam dan Barat.* Yogyakarta: Gama Media, 2003.

Rahmat, Jalaluddin. *Islam Alternatif.* Bandung: Mizan, 1998.

Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia, 2010.

Rosyada, Dede. *Paradigma Pendidikan Demokratis*. Jakarta: Kencana.

Sad Iman, Muis. *Pendidikan Partisipatif.* Yogyakarta: Safiria Insani Press & MSI UII, 2004.

Sukaya, E.Z. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Paradigma. 2002.

Sumarsono, S. *Pendidikan Kewarganegaraan.* Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional. 2000.

Syafi'i Ma'arif, Ahmad. "Ketika Pendidikan Tidak Membangun Kultur Demokrasi", Prawacana untuk Zamroni, *Pendidikan untuk Demokrasi: Tantangan Menuju Civil Society*. Yogyakarta: Bigraf, t.th.

Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP-UPI, *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan Bahasa III.* Bandung: PT Imtima, 2009.

Ubaidillah, A. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*. Jakarta: IAIN Jakarta Press. 2000.

Usman, Husaini. "Menuju Masyarakat Madani Melalui Demokratisasi Pendidikan" dalam www.depdiknas.go.id/jurnal/28/htm.

Wei-ming, Tu (Ed.), *Confucian Traditions in East Asian Modernity.* US America: Harvard University Press, 1996.

Winataputra, U.S. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education).* Jakarta: IAIN Jakarta Press. 2000.

Zamroni. *Pendidikan untuk Demokrasi Tantangan Menuju Civil Society.* Yogyakarta: Bigraf Publishing. 2001.